

PENGARUH PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO

M. Ahmar Muammar^{1*}, Hafiz Elfiansya Parawu², Nasrul Haq³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the effect of the application of E-Government on the implementation of good governance in the Office of Communication, Informatics and Statistics of Wajo Regency. The research method is quantitative research. The population in this study were 36 people and 44 employees. The sample was drawn using saturated sampling. The data validation technique is validity test, reliability test, data analysis technique is descriptive analysis technique. The results showed that the value of the regression coefficient (b) was 35.583 which stated that the application of E-Government (X) had an effect on the implementation of Good Governance (Y). Based on the results of $t_{count} > t_{table}$ ($35,583 > 1,994$) or significant (Sig) of 0,000 is less than < 0.05 , so it means that hypothesis one (H1) is accepted. This means that the first hypothesis (H1) the application of E-Government is significant on the implementation of good governance in the Ministry of Communication and Information and Statistics. The E-Government contribution of 30.6% means that there are other things that can increase public awareness besides the leadership of the village head.

Keyword: *e-government, good governance, society*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *E-Government* Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 36 masyarakat dan 44 pegawai penarikan sampelnya menggunakan sampling jenuh. Teknik pengabsahan data yaitu Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Teknik Analisis Data Yaitu Teknik Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi (b) nilainya sebesar 35,583 yang menyatakan bahwa penerapan *E-Government* (X) berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Governance* (Y). Berdasarkan hasil t hitung $> t$ tabel ($35,583 > 1,994$) atau signifikan (Sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari $< 0,05$, sehingga berarti hipotesis satu (H1) diterima. Hal ini berarti hipotesis pertama (H1) Penerapan *E-Government* signifikan terhadap Pelaksanaan *Good Governance* di Dinas Kominfo dan Statistik. Kontribusi *E-Government* sebesar 30,6% dapat diartikan bahwa ada hal lain yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat selain kepemimpinan lurah.

Kata kunci: *e-government, good governance, masyarakat*

* ahmar@gmail.com



PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab akan kemajuan daerah setempat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya, hal inilah yang dimaksud dengan otonomi daerah. Pemerintah diharuskan bisa menjadi lebih baik untuk mengikuti perkembangan yang semakin maju, untuk mengimbangi hal tersebut maka muncullah istilah pemerintahan yang berbasis elektronik atau dengan kata lain (*E-Government*).

Penyelenggaraan *E-Government* di Indonesia telah dimulai saat sebelum adanya Inpres No. 3 Tahun 2003, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan jaringan telepon. Pemerintah menyadari akan manfaat penyelenggaraan *E-Government* yang mendukung penyelenggaraan *Good Governance*. Penyelenggaraan ini membuka cakrawala baru dalam keterbukaan dan daya tanggap dikalangan pemerintah serta tanggung jawab pemerintah. Di Indonesia, inisiatif menerapkan *E-Government* telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika).

Kemudian keluarnya Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang diinstruksikan kepada :

Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Dan Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *E-Government* secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan pemenuhan segala aspek untuk menuju *Good Governance* yang baik guna melakukan pelayanan yang maksimal. Pesatnya kemajuan teknologi juga dapat membuat masyarakat dapat mengetahui informasi dengan sangat cepat. Sebagai akibatnya terjadi tekanan dari masyarakat kepada pemerintah untuk lebih memanfaatkan dan memperbaiki kinerja pemerintah.

Dengan ini muncul sistem *E-Government* sebagai akibat tekanan dari masyarakat.

Dengan menerapkan sistem *E-Government*, maka masyarakat dapat memantau aktifitas dari apa yang direncanakan dan telah dilakukan oleh pemerintah, kemudian akan memicu kinerja pemerintah yang jauh lebih baik. Pemanfaatan *E-Governmnet* sendiri dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi dari kinerja aparat pemerintah, arus informasi yang cepat, dan adanya media yang menampung segala aspirasi dari seluruh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No.3 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Kemudian Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah dijelaskan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Sistem *E-Government* secara umum didefinisikan sebagai

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik untuk memudahkan pemerintah Kumar dan Best dalam Heryana (2013: 2).

Bank Dunia (*World Bank*) dalam Sari dan Winarno (2012: 2) menuliskan bahwa *E-Government* mengarahkan untuk menggunakan teknologi informasi oleh semua agen pemerintahan (seperti WAN, internet, *mobile computing*) yang mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak yang terkait oleh pemerintah. Sedangkan *E-Government* menurut Indrajit (2004:3) *E-Government* merupakan penggunaan ICT (*Information Communication Technology*) untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.

Hole dalam Nugraha (2018: 4) menegaskan bahwa konseptual dasar dari *E-Government* sebenarnya adalah bagaimana memberikan pelayanan melalui elektronik (*E-Service*), seperti melalui internet, jaringan telepon dan komputer serta multimedia.

Berbagai definisi telah dijelaskan dan dipaparkan oleh para ilmuwan diberbagai belahan dunia yang berfokus pada kepentingan masyarakat guna mempercepat proses pelayanan pada masyarakat agar lebih efektif dan

efisien. Pakar dalam negeripun tak luput memberikan definisinya mengenai konsep *E-Government*, yaitu secara teoritik dipahami sebagai upaya untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah, masyarakat dan swasta hingga dapat menjadi lebih efektif dan efisien, yang kesemuanya itu dapat dipakai dengan reformasi birokrasi baik itu pembenahan, kelembagaan, sumber daya manusia dan sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di instansi pemerintah, juga memperluas partisipasi publik. Pendayagunaan *E-Government* bertujuan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik Gunawan dan Yuwono (2007).

Indrajit, (2004: 5) menjelaskan mengenai manfaat *E-Government* yaitu: 1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakehodernya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. 2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good corporace governance*. 3) Mengurangi secara signifikan total

biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. 4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. 5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada. 6) Memperdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Berdasarkan definisi *E-Government* tersebut dapat dilihat bahwa *E-Government* identik dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dapat dikatakan juga bahwa *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antara pemerintah dan pihak lain.

Dengan menerapkan sistem *E-Government*, maka masyarakat dapat memantau aktifitas dari apa yang

direncanakan dan telah dilakukan oleh pemerintah, kemudian akan memicu kinerja pemerintah yang jauh lebih baik. Pemanfaatan *E-Government* sendiri dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari kinerja aparat pemerintah, arus informasi yang cepat, dan adanya media yang menampung segala aspirasi dari seluruh masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No.3 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Kemudian Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah dijelaskan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan sistem *E-Government* dalam penataan tata kelola

pemerintah harus dijalankan dengan baik, jika hal ini dapat berjalan dengan semestinya maka *Good Governance* dapat terwujud. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *E-Government* merupakan suatu perwujudan untuk menyukseskan tata kelola pemerintah dengan baik.

Dalam laporan Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang kembali mempublikasikan peringkat *E-Government Development Index* (EGDI) berdasarkan survei tahun 2018 (www.kominfo.go.id). Pada tahun ini Indonesia menempati posisi ke-107 EGDI, naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016 yang menduduki peringkat ke-116. Indonesia menempati peringkat ke-7 di *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) setelah Vietnam. Peringkat Indonesia ini masih berada jauh di bawah negara-negara di ASEAN lainnya seperti Singapura (peringkat ke-7 EGDI), Malaysia (peringkat ke-48 EGDI), Brunei Darussalam (peringkat ke-59 EGDI), Thailand (peringkat ke-73 EGDI), Philippines (peringkat ke-75 EGDI), dan Vietnam (peringkat ke-88 EGDI).

Kabupaten Wajo sudah menerapkan *E-Government* dalam

pelaksanaan *Good Governance* (www.wajokab.go.id). Sehingga sistem informasi ini sangat penting, karena berperan sebagai pendukung fungsi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Dengan adanya sistem yang diterapkan di instansi pemerintah di Kabupaten Wajo maka masyarakat akan dengan mudah mengakses informasi terkait dengan kegiatan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah seperti informasi kebijakan dan program-program yang sudah atau telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Namun sejauh ini *E-Government* yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo belum terlalu terekspos ke masyarakat sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui program layanan pemerintah ini. Minimnya akses informasi yang ada pada portal resmi Kabupaten Wajo (wajokab.go.id) juga menjadi salah satu perhatian dimana pemerintah selaku pelayan publik harus mengedepankan keterbukaan penyedia informasi bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini kurang lebih selama 2 (dua) bulan. Peneliti memilih lokasi untuk melakukan penelitian di instansi

pemerintah tepatnya di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena peneliti ingin mengetahui pengaruh *E-Government* terhadap pelaksanaan *Good Governance* di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan alasan karena peneliti ingin menganalisis bagaimana Pengaruh Penerapan *E-Government* Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* di Dinas Kominfo Kabupaten Wajo. Adapun tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kuantitatif karena peneliti akan mendeskripsikan bagaimana Pengaruh Penerapan *E-Government* Terhadap Pelaksanaan *Good Governance* di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. Sampel Jumlah pegawai di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Sebanyak 44 orang dan masyarakat sebanyak 36 orang. Maka teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh yaitu dimana semua anggota populasi menjadi sampel dan untuk teknik penentuan pengambilan sampel masyarakat untuk data pembandingan menggunakan teknik aksidental sampling yaitu pengambilan sampel secara kebetulan siapa saja yang

ditemui di lokasi penelitian. Peneliti akan melakukan uji validitas dengan menggunakan software SPSS version 25.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Wajo dengan ibu kota Sengkang, terletak dibagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Makassar Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara $03^{\circ} 39' - 04^{\circ} 16'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 53' - 120^{\circ} 27'$ Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah hingga dataran rendah bergelombang dengan ketinggian wilayah 0-520 Mdpl. Hanya sebagian kecil berupa perbukitan di bagian utara. Bagian timur merupakan dataran rendah dan pesisir teluk Bone, termasuk pulau-pulau pasir diteluk Bone. Sedangkan bagian barat merupakan dataran aluvial Danau Tempe-Danau Sidenreng. Memiliki luas wilayah, yaitu 2.506,19 km² atau 4,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,4%) dan lahan kering 164.322 Ha (65,57%). Sedangkan batas wilayah Kabupaten Wajo ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu

dan Kabupaten Sidrap, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap.

Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Visi adalah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan dari nilai, arah dan tujuan organisasi yang memberikan kekuatan, semangat dan komitmen serta memiliki daya tarik dan dapat diyakini sebagai pengaruh dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi. Dengan visi, organisasi akan memperoleh gambaran yang jelas tentang arah dan sosok masa depan organisasi kemana dan bagaimana instansi pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, kreatif, inovatif serta produktif. Visi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo adalah “*Tersedianya informasi dan komunikasi, persandian serta data statistik yang berkualitas dalam mewujudkan Kabupaten Wajo yang cerdas, produktif dan unggul*”

Misi Dnas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo adala sebagai berikut; a). Meningkatkan profesionalisme aparat Dinas Komunikasi Informatika dan

Statistik Kabupaten Wajo. b). Meningkatkan sarana informasi potensi daerah melalui media internet pemberdayaan KIM. c). Meningkatkan sistem komunikasi yang mampu menghubungkan antar desa. d). Mendorong peranan media massa dalam menciptakan informasi yang berkualitas dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, produktif dan unggul. e). Membrdayakan potensi informasi dan komunikasi pemerintah dan masyarakat. f). Meningkatkan data dan informasi yang berkualitas yang berbasis informasi dan teknologi. g). Meningkatkan kualitas produk-produk pembangunan daerah.

Dalam penelitian ini yang menjadi respondennya adalah masyarakat dan

pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Responden Pegawai, Jenis kelamin laki-laki dan perempuan responden masyarakat dan pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Dari data pada tabel terkait distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat kita ketahui bahwa laki-laki yang menjadi responden adalah 17 orang atau (39%) dan perempuan sebanyak 27 orang atau (61%).

Dalam penelitian ini, pegawai yang menjadi responden berada pada tingkat umur yang berbeda-beda, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Distribusi Responden Berdasrkan Umur

No	Umur	Frekuensi (orang)	Presentase (%)
1.	17-25 Tahun	7	16
2.	26-35 Tahun	12	27
3.	36-45 tahun	17	39
4.	>46 Tahun	8	18
Jumlah		44	100

Sumber: Kuesioner Peneltian 2019

Berdasarkan tabel 1 terkait identitas responden berdasarkan umur, pegawai yang paling banyak adalah pegawai yang berada pada kelompok umur 36-45 tahun yaitu sebanyak 17 orang atau (39%), kemudian kelompok

umur 26-35 tahun yaitu sebanyak 12 orang atau (27%), dan kelompok umur >46 tahun sebanyak 8 orang atau (18%), kemudian yang terendah adalah kelompok umur 17-25 tahun dengan 7 orang atau (16%). Maka dapat

disimpulkan bahwa responden yang berumur 36-45 merupakan responden terbanyak dari responden pegawai yaitu sebanyak 17 orang atau 39%.

Pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel terkait identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat bahwa pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini dengan tingkat pendidikan Sarjana adalah 35 orang atau (79%), kemudian tingkat pendidikan SMA/Sederajat adalah 3 orang (7%), dan tingkat pendidikan Pasca Sarjana adalah 6 orang atau (14%), kemudian tidak ada yang bersatatus Diploma. Maka responden terbanyak merupakan

responden dari tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 35 orang atau 79%.

Responden Masyarakat, Jenis kelamin responden yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dapat dilihat dari tabel berikut: Berdasarkan tabel terkait distribusi berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat bahwa dari seluruh responden masyarakat yang berjumlah 36 orang, jumlah responden yang lebih banyak adalah jenis kelamin laki-laki yaitu 21 orang atau (58%) sedangkan perempuan sebanyak 15 orang atau (42%).

Dalam penelitian ini, masyarakat yang menjadi responden berada pada tingkat umur yang berbeda sebagai berikut:

Tabel 2.
Distribusi Responden Berdasarkan Pada Umur

No	Umur	Frekuensi (orang)	Presentase (%)
1.	17-25	9	25
2.	26-35	22	61
3.	36-45	4	11
4.	>46	1	3
Jumlah		36	100

Sumber: Kuesioner Penelitian 2019

Berdasarkan tabel 2 terkait distribusi responden berdasarkan umur, dapat kita ketahui bahwa masyarakat yang menjadi responden adalah masyarakat yang berada pada kelompok umur 26-35 sebanyak 22 orang atau

(61%), dan responden yang berumur antara 17-25 sebanyak 9 orang atau (25%) kemudian responden yang berumur 36-45 tahun sebanyak 4 orang atau (11%) sedangkan responden yang berada di atas umur 46 tahun hanya 1

orang atau (3%). Maka dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak merupakan responden yang berumur 26-35 sebanyak 22 orang atau 61%.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi responden penelitian di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo paling banyak adalah dengan tingkat pendidikan Sarjana dengan 24 orang atau (67%), kemudian responden dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat sebanyak 9 orang atau

(25%), dan responden dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 3 orang atau (8%), sedangkan tidak ada responden dari SD/SMP dan Diploma.

Untuk melihat hasil pengaruh penerapan *E-Government* terhadap Pelaksanaan *Good Governance* pada responden sebanyak 80 orang yang dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana dengan bantuan SPSS versi 25.0. Adapun hasil analisis regresi sederhana dapat diperoleh seperti pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3.
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	236.994	1	236.994	34.521	,000 ^b
Residual	535.493	78	6.865		
Total	772.488	79			

a. Dependent Variable: *Good Governance*

b. Predictors: (Constant), *E-Government*

Pengaruh *E-Government* terhadap *Good Governance* dapat ditentukan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Pembuatan regresi linier sederhana dapat dilakukan untuk menganalisis pengaruh linier sederhana antara variabel *E-Government* (X) terhadap variabel *Good Governance* (Y) di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. Pengambilan keputusan dalam uji regresi linier

sederhana mengacu pada dua hal yakni;
a. Jika nilai signifikan lebih kecil < 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, maka Hipotesis satu (H1) diterima. b. Jika nilai signifikan lebih besar > 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y, maka Hipotesis satu (H1) ditolak.

Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel 3 Anova diatas

digunakan untuk menentukan model persamaan regresi sederhana yang diketahui bahwa nilai F hitung = 34.521 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000

lebih kecil < 0,05 maka variabel *E-Government* berpengaruh terhadap variabel *Good Governance* (Y).

Tabel 4.
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	35.583	6.076		5.857	,000
1 <i>E-Government</i>	.498	.085	.554	5.875	,000

a. Dependent Variable: *Good Governance*

Adapun rumus persamaan regresi sederhana yang digunakan dalam menentukan besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 35.583 + 0.498 (0)$$

$$Y = 35.583$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat diinterpretasikan bahwa nilai koefisien regresi (b) nilainya sebesar 35.583 yang menyatakan bahwa variabel independen

atau *E-Government* (X) berpengaruh positif terhadap variabel dependen atau *Good Governance* (Y). berdasarkan hasil t hitung > t tabel (35.583 > 1.994) atau signifikan (sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari < 0,05, sehingga Hipotesisi satu (H1) diterima. Hal ini berarti hipotesis pertama (H1) *E-Government* berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance* di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.

Tabel 5.
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.554 ^a	.306	.298	2.62017

a. Predictors: (Constant), *E-Government*

Berdasarkan hasil analisis data statistik tabel 5 model summary diatas, menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan (R) sebesar 0.554. dari besar pengaruh variabel independen atau *E-Government* terhadap variabel dependen atau *Good Governance* ditunjukkan oleh nilai R Square sebesar 0.306 artinya 30,6% besar pengaruh variabel independen atau *E-Government* (X) terhadap variabel dependen atau *Good Governance* (Y) di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Wajo. Dari hasil output tersebut berada pada tingkayan cukup baik. Hal ini berarti penerapan *E-Government* baik maka *Good Governance* akan terlaksana. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pengawasan Terhadap Profesionalisme Kerja Pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya hasil penelitian yang telah di uji menggunakan alat analisis regresi sederhana memperoleh hasil β positif 1,948 dan tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya pengawasan berpengaruh positif dan

signifikan terhadap profesionalisme kerja pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. Hal ini dibuktikan dengan nilai R square sebesar 0,997 atau 99,7 % yang artinya kontribusi pengawasan sebesar 0,997 atau 99,7% terhadap profesionalisme kerja pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, sedangkan 0,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Sehingga hasil hipotesis yang menyatakan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profesionalisme kerja pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. Untuk meningkatkan profesionalisme kerja pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang pimpinan harus lebih meningkatkan pengawasan supaya pekerjaan pegawai bisa terarah dan memuaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brantas, M. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Gary, Desseler. 2003. *Manajemen SDM*. Jakarta: Indeks.
- Hardianti, R. (2017). Pengaruh Pembagian Kerja dan Pengawasan Terhadap efektivitas pegawai di Kantor Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Pemerintahan Integratif volume 5 nomor 4*, 572.

- Manullang, D. M. (2002). *Dasar-Dasar manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moekijat, D. (1989). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen Perusahaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Nurbaiti. 2013. Analisis Profesionalisme Kerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Nagan Raya. (file:///C:/Users/User/Documents/proposal/BAB%20I_V.pdf). Di akses 2 April 2018.
- Peraturan Presiden No 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
- Priyono. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Surabaya: Zifatama Publisher.
- Seridawati. 2010. Pengaruh Profesionalisme Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (studi kasus Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Aceh Selatan).
- Siagian, S. P. (1987). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Siagian, S. P. (2008). *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sukarna, D. (1992). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju
- Thoha, Miftah. 2001. *Perilaku Organisasi: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 3 ayat 1
- Widjaja, A. W. (2006). *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.